

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* yang dikembangkan oleh Donalson, Lex, dan Davis menciptakan suatu paradigma baru untuk memahami hubungan antara pemilik dan manajemen dalam suatu organisasi. Fokus utama *Stewardship Theory* adalah mencapai harmoni antara pemilik modal (*Principles*) dalam mencapai tujuan bersama.

Teori ini menggambarkan situasi di mana *steward*, sebagai pengelola modal atau manajemen, termotivasi untuk mencapai tujuan utama mereka semata-mata demi kepentingan organisasi, mengesampingkan tujuan individu atau kelompok. Dalam konteks ini, *stewardship* menciptakan landasan di mana manajemen diarahkan untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (Ferdiansyah, 2020).

Stewardship Theory menegaskan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih fokus pada tujuan utama organisasi, memprioritaskan kepentingan kolektif (Anton, 2010). Teori ini juga menunjukkan bahwa manajer, sebagai *steward*, tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan berorientasi pada tujuan utama organisasi, membentuk dasar psikologi dan sosiologi di mana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).

Dalam konteks organisasi sektor publik, teori *stewardship* dapat diterapkan untuk memaksimalkan utilitas *principal* dan manajemen, menciptakan hubungan di mana *steward* (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk memuaskan kebutuhan rakyat. Akuntansi sebagai alat penggerak dan pelaporan dalam organisasi sektor publik menjadi penting untuk memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Teori ini menekankan pemisahan fungsi tersebut untuk menciptakan kepercayaan dan mewujudkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kekayaan Negara.

Dengan prinsip bahwa akuntansi adalah alat pengendalian diri dan sarana pelaporan aktivitas manajemen, teori *stewardship* menegaskan pentingnya

pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan serta kontrak hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan tujuan organisasi. Teori ini dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik, di mana kepentingan rakyat harus diutamakan dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada *steward* (pemerintah) untuk memuaskan keinginan rakyat.

Dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, konsep teori *Stewardship* sangat relevan untuk memahami dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut. Menurut teori ini, kepala desa dan pihak terlibat memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara sumber daya atas nama masyarakat. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan aset yang berkualitas menjadi fokus penting, karena hal ini dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Stewardship*, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat menciptakan lingkungan yang transparan, partisipatif, dan responsif, memperkuat ikatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa..

2.2 Kepercayaan Masyarakat

Menurut Mowen dan Minor yang dikutip oleh Priansa (2021), kepercayaan adalah segala pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen serta semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen mengenai objek, atribut, dan manfaatnya. Di sisi lain, Rousseau et al, juga dalam penelitian Priansa (2021), mendefinisikan kepercayaan sebagai wilayah psikologis yang mencakup ketertarikan untuk menerima sesuatu apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku positif dari orang lain.

Maharani & Darmastuti (2010), seperti yang dikutip dalam penelitian tersebut, mengartikan kepercayaan sebagai keyakinan suatu pihak terhadap reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam suatu hubungan. Ini juga melibatkan keyakinan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tersebut adalah yang terbaik dan akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang mempercayai. Di samping itu, Pavlo yang disitir oleh Priansa (2021) menyatakan bahwa kepercayaan adalah penilaian dalam hubungan seseorang dengan orang lain, di mana pihak yang

dipercayai diharapkan akan melakukan transaksi sesuai dengan harapan, terutama dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Dari pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan yang dipegang oleh individu atau kelompok ketika janji, pernyataan, baik lisan maupun tertulis, dari individu atau kelompok lain dapat direalisasikan.

Kepercayaan masyarakat diartikan bahwa masyarakat percaya jika pemerintah mampu, pemerintah baik, dan jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur Negara (Grimmelikhuijsen, 2012) dan kepercayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat merasa puas dengan pemerintah (Fard & Rostamy, 2007).

2.3 Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan public. Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, definisi kepuasan masyarakat sering di sama artikan dengan definisi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen, hal ini hanya dibedakan pada siapa penyedia dan apa motif diberikannya pelayanan tersebut (Rezha, 2013) dan kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan produk atau layanan jasa dengan harapan (Atmaja, 2018).

2.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan terhadap peraturan perundangan (Halim & Kusufi, 2018). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas keuangan. Ada dua aspek dalam akuntabilitas keuangan, diantaranya adalah :

- a. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya.
- b. Pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Prinsip akuntabilitas keuangan juga ada dua hal, meliputi :

- a. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dicapai.

Dalam akuntabilitas keuangan juga terdapat beberapa instrument utama yang harus diperhatikan yaitu anggaran pemerintah, data yang dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya. Reformasi keuangan daerah memunculkan adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam akuntabilitas keuangan. Dapat diartikan bahwa adanya reformasi keuangan menuntut akuntabilitas kinerja yang tercermin dari akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan wujud dari semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah atas penggunaan dana keuangan dalam rangka untuk pelayanan publik.

2.5 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kunci dari terwujudnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja juga tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor public (Bastian, 2010). Dalam konteks hukum, akuntabilitas organisasi harus dipenuhi oleh suatu organisasi

atas kinerja yang diperoleh secara efektif dan efisien. Pandangan lainnya muncul dari Ledvina dalam Santoso & Pambelum (2008) bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada di luar tanggungjawab dan kewenangan.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menjelaskan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Misi ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Sulisyanti & Binawati (2020), tujuan dan sasaran dari akuntabilitas kinerja adalah mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Berikut tujuan dan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja, yaitu :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi dengan efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk

desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan *Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

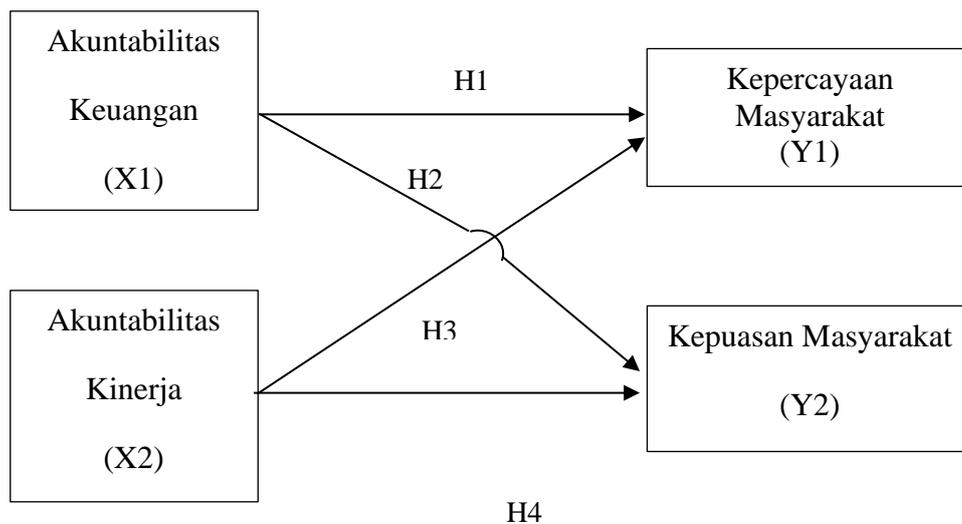
No	Judul Penelitian	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau	Sari (2022)	Variabel dependen : Kepuasan Masyarakat Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Variabel independen : Pengaruh Kualitas Layanan	1. Kualitas Layanan sangat berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau.
2.	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Wonosari Kabupaten Malang	Restufiani (2022)	Variabel dependen : Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Wonosari Kabupaten Malang Variabel independen: Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi	1. Pengaruh Akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Wonosari Kabupaten

				Malang. 2. Pengaruh Transparansi sangat berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Wonosari Kabupaten Malang.
3.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	Fiddah (2022)	Variabel dependen : Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Variabel independen : Pengaruh Kualitas Pelayanan	1. Pengaruh Kualitas Pelayanan sangat berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
4.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung	Putra et al. (2022)	Variabel dependen : Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Variabel independen : Pengaruh Kualitas Pelayanan	1. Pengaruh Kualitas Pelayanan sangat berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Mutia et al. (2022)	Variabel dependen : Peningkatan	1. Pelaksanaan Pelayanan Publik

	Terhadap Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen		Kepercayaan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Variabel independen : Pelaksanaan Pelayanan Publik	sangat berpengaruh terhadap Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
6.	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa	Sulisyanti & Binawati (2020)	Variabel dependen : Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa Variabel independen : Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja	1. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan sangat berpengaruh terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa 2. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja sangat berpengaruh terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa

2.8 Kerangka Pikir

Penelitian menggunakan 2 variabel yaitu variabel Independen dan variabel Dependen. Variabel independen yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Sedangkan variabel dependen yaitu kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat. Dibawah ini adalah gambaran skema kerangka pikir dari penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.9 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Sulisyanti & Binawati (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan terhadap peraturan perundangan (Halim & Kusufi, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan masyarakat.

2. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Sulisyanti & Binawati (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan terhadap peraturan perundangan (Halim & Kusufi, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kepuasan masyarakat.

3. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Sulisyanti & Binawati (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas kinerja adalah kunci dari terwujudnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja juga tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor publik (Bastian, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan masyarakat.

4. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Sulisyanti & Binawati (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

masyarakat. Akuntabilitas kinerja adalah kunci dari terwujudnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja juga tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor publik (Bastian, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kepuasan masyarakat.